



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN**

Jalan Beringin II, Pandansari, Ciawi, Kabupaten Bogor 16720
Telepon (0251) 8249001 – 8249005, Faksimile (0251) 8248986
E-mail: pusdiklatwas@bpkp.go.id, Website: <http://pusdiklatwas.bpkp.go.id>

Nomor : OT.06/S-1824/DL/02/2026 06 Agustus 2026
Lampiran : Dua Berkas
Hal : Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM) Pusdiklatwas
BPKP Semester 1 Tahun 2026

Yth. Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Kelola
di Jakarta

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Utama Nomor OT.06/S-885/SU/01/2026 tanggal 13 Juli 2026 tentang Pelaksanaan SKM *Online* Tahun 2026 di Lingkungan BPKP, dengan ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pusdiklatwas BPKP Semester 1 Tahun 2026 dan Laporan Hasil Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Pusat,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Raden Murwantara

Tembusan:
Yth. Sekretaris Utama



Dokumen Ini Telah Ditandatangani
secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E

ISO 37001:2025
Sistem Manajemen Anti Penyuapan

ISO 9001:2015
Sistem Manajemen Mutu

GIACorpu
Government Internal Audit
Corporate University

LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

A photograph of a modern, multi-story building with a glass facade, featuring the GIA Corpu logo on its upper section.


GIACorpu

GIA Corpu

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan
BPKP
Semester I Tahun 2026

OT.06/LPP-1832/DL/02/2026
6 Agustus 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	1
1.1 Jumlah Responden SKM	1
1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)	2
BAB II ANALISIS HASIL SKM	3
2.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan	3
2.2 Rencana Tindak Lanjut	4
2.3 Tren Nilai SKM	5
BAB III KESIMPULAN	6
LAMPIRAN	
1. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM pada Periode 2025	

BAB I

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

1.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 166 (seratus enam puluh enam) orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Pendidikan	Tidak Sekolah	0	0,00%
		SD/Sederajat	0	0,00%
		SMP/Sederajat	0	0,00%
		SMA/Sederajat	2	1,20%
		D1/D2/D3	4	2,41%
		D4/S1	86	51,81%
		S2	70	42,17%
		S3	4	2,41%
2.	Pekerjaan	TNI/POLRI	18	10,84%
		Swasta	2	1,20%
		Wiraswasta	0	0,00%
		Ibu Rumah Tangga	0	0,00%
		Pelajar/Mahasiswa	0	0,00%
		Petani/Nelayan	0	0,00%
		Pekerja Lepas/ Freelance	0	0,00%
		Pensiunan	0	0,00%
		Tidak Bekerja	0	0,00%
		Lain-lain	10	6,02%
		ASN (PNS/PPPK)	136	81,93%
3.	Kategorisasi Pengguna Layanan	Non Disabilitas	166	100,00%
		Disabilitas	0	0,00%
4.	Kategorisasi Jenis Disabilitas	Disabilitas Fisik	0	0,00%
		Disabilitas Intelektual	0	0,00%
		Disabilitas Mentalan	0	0,00%
		Disabilitas Sensory	0	0,00%

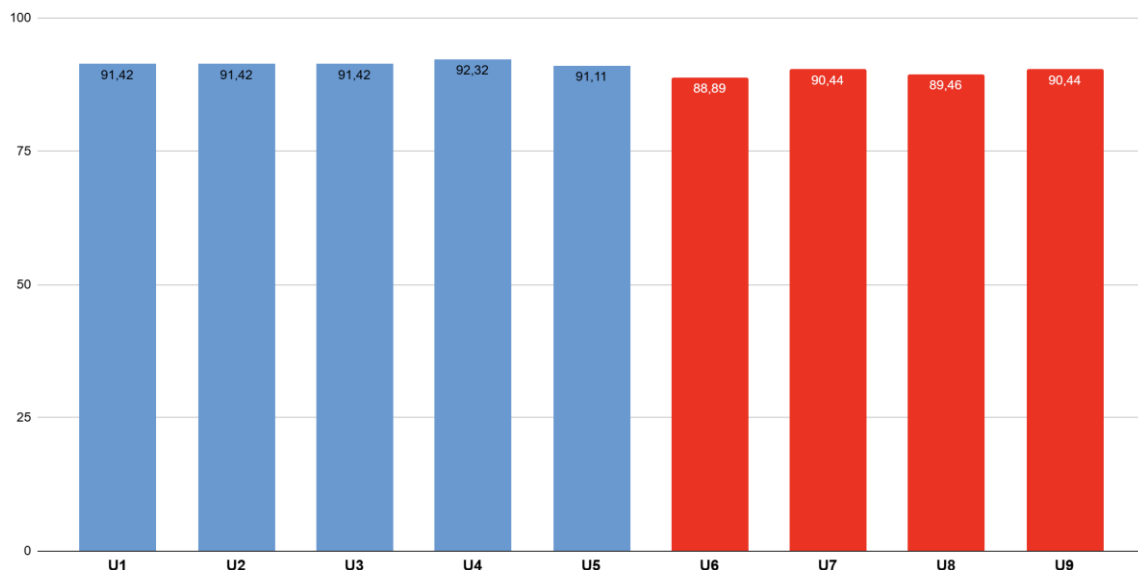
1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	91,42	91,42	91,42	92,32	91,11	88,89	90,44	89,46	90,44
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	90,77 (A atau Sangat Baik)								

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur
IKM per Unsur pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan
Tahun 2026



Keterangan masing-masing Unsur:

U1 : Persyaratan

U2 : Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

U3 : Waktu Penyelesaian

U4 : Biaya/Tarif

U5 : Produk/Spesifikasi Jenis Pelayanan

U6 : Kompetensi Pelaksana

U7 : Perilaku Pelaksana

U8 : Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

U9: Sarana dan Prasarana

BAB II

ANALISIS HASIL SKM

2.1. Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Tiga unsur layanan dengan nilai terendah, yaitu:
 - a. Kompetensi Pelaksana (U6) menjadi unsur dengan skor terendah yaitu 88,89.
 - b. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U8) menjadi unsur dengan skor terendah kedua yaitu 89,46.
 - c. Perilaku Pelaksana (U7) dan Sarana dan Prasarana (U9) menjadi unsur dengan skor terendah ketiga secara bersamaan dengan skor 90,44.
2. Tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi, yaitu:
 - a. Unsur Biaya/Tarif (U4) menjadi unsur dengan skor tertinggi pertama yaitu 92,32.
 - b. Persyaratan (U1), Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2) dan Waktu Penyelesaian (U3) menjadi unsur dengan skor tertinggi kedua secara bersamaan dengan nilai 91,42.
 - c. Terakhir, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5) menjadi unsur dengan skor tertinggi ketiga dengan nilai 91,11

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut:

- “Tidak semua fasilitas yang ada di Pusat Pelatihan dapat dijangkau dengan cepat dan baik, dimana pelayanan kesehatan cenderung jauh dari pusat pelatihan.”
- “Makan siang menunya minimalis, kalau bisa menunya lebih bervariasi dan *tasty*”;
- “Kasur di tempat penginapan diklat sepertinya udah bisa diganti.”

- “Wifi sangat lemot, dan sering terputus.”
- “Perbaiki sistem agar tidak ada lagi kendala teknis dalam pelaksanaan ujian online dan PJJ.”
- “Pada saat ujian menggunakan komputer di lab komputer sinyal internet sering bermasalah sehingga ujian mengalami *delay*”
- “Saat ujian *by* aplikasi, jaringan internet tidak stabil sehingga mengganggu konsentrasi peserta saat mengerjakan ujian”
- “Kurang ramahnya LO, dibutuhkan *service excellence* kepada seluruh peserta yang wajib diberikan oleh siapapun yg berasal dari GIA CORPU saat pelatihan.”

2.2. Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisis tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, atas hasil analisis tersebut dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya. Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Kompetensi Pelaksana	Memberikan pelatihan khusus terkait Manajemen Organisasi Pelatihan (MOT) dan <i>Training Officer Course</i> (TOC)			√		- Bidang P3Was - Bidang P3Manwas - Bidang P5
		Pemutakhiran konten <i>website</i> mengenai informasi pelatihan			√		- Bidang P5 - Bagian Umum
2	Perilaku Pelaksana	Melakukan internalisasi layanan prima ke seluruh pegawai			√		- Bagian Umum
		Memberikan pelatihan khusus terkait <i>service excellent</i>			√		- Bidang P5 - Bagian Umum
3	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Penataan layanan konsultasi dan pengaduan di berbagai <i>platform</i>			√		- Bidang P5 - Bagian Umum
		Mewajibkan Petugas Piket dan/atau LO untuk menginfokan kepada peserta terkait fasilitas layanan aduan			√		- Bidang P3Was - Bidang P3Manwas
4	Sarana dan Prasarana	Melakukan <i>Bandwidth Control / Load Balancer</i> /limitasi <i>bandwidth</i> untuk menjamin ketersediaan dan			√		- Bidang P5

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
		kestabilan jaringan bagi setiap perangkat terhubung					
		Monitoring dan Evaluasi berkala kualitas menu makanan			√		- Bidang P5 - Bagian Umum
		Penambahan layanan konsultasi kesehatan 24 jam melalui <i>Whatsapp</i>			√		- Bagian Umum
		Monitoring dan Evaluasi berkala kelayakan fasilitas mess (Kasur, Handuk, Ketersediaan Air Panas)			√		- Bagian Umum

2.3. Tren Nilai SKM Tahun 2022 s.d. Periode Tahun 2026

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan dapat dilihat melalui grafik berikut:

Grafik Nilai SKM Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP
Periode Tahun 2022 s.d. Semester 1 Tahun 2026



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari periode tahun 2022 hingga Semester 1 Tahun 2026 pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.

BAB III

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama Semester 1 Tahun 2026, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan publik di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 90,77. Nilai SKM Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari periode tahun 2022 hingga Semester 1 tahun 2026.
2. Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Kompetensi Pelaksana (U6), Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U8), serta Perilaku Pelaksana (U7) dan Sarana dan Prasarana (U9).
3. Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur tertinggi yaitu Unsur Biaya/Tarif (U4), Persyaratan (U1), Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2) dan Waktu Penyelesaian (U3), serta Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5).

Ciawi, 6 Agustus 2026

Kepala Pusdiklatwas

Ditandatangani secara elektronik

Raden Murwantara



LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT PELAKSANAAN SKM 2025

Nomor OT.04/LPP-2339/DL/01/2025

Tanggal 12 September 2025

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN



**Laporan Hasil Tindak Lanjut Pelaksanaan
Survei Kepuasan Masyarakat
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP
Triwulan III Tahun 2025**



**Nomor OT.04/LPP-2339/DL/01/2025
Tanggal 12 September 2025**

BAB I

DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP periode 2025 menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode 2025

No	Unsur	IKM	Mutu Layanan
1	Persyaratan	3,61	Sangat Baik
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,68	Sangat Baik
3	Waktu Penyelesaian	3,58	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	3,59	Sangat Baik
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	3,60	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,60	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,63	Sangat Baik
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,61	Sangat Baik
9	Sarana dan Prasarana	3,58	Sangat Baik

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari 3 unsur dengan nilai terendah.

BAB II

RENCANA TINDAK LANJUT

Kerangka rencana tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM

No	Prioritas Unsur	Program/ Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	Waktu Penyelesaian	Mengingatkan pengajar agar waktu penyampaian materi dapat sesuai jadwal (waktu istirahat, penyelesaian materi, dll)	V				Petugas piket
		Pembagian diklat kit dilakukan pada hari pertama pelatihan		V			Bagian Umum
2	Sarana dan Prasarana	Peningkatan kebersihan kamar	V				Bagian Umum
		Penyediaan smoking area	V				Bagian Umum
3	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Layanan	Penyesuaian produk layanan diklat mengacu kepada kebijakan pengawasan terkini.	V				P4
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Perubahan metode diklat dari Tatap Muka menjadi PJJ		V			P4

BAB III

REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Dokumentasi Kegiatan
1	1.1. Mengingatkan pengajar agar waktu penyampaian materi dapat sesuai jadwal (waktu istirahat, penyelesaian materi, dll)	Sudah	Petugas piket telah mengingatkan pengajar saat memasuki waktu istirahat, serta menginformasikan jadwal berakhirnya penyampaian materi.	
	1.2. Pembagian diklat kit dilakukan pada hari pertama pelatihan	Sudah	Penyediaan buffer stock diklat kit lebih banyak, telah dimulai sejak TW II 2025.	

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Dokumentasi Kegiatan
				
2	2.1 Peningkatan kebersihan kamar	Sudah	Pengendalian kebersihan kamar melalui pelaporan petugas kebersihan melalui dokumentasi foto.	
	2.2 Penyediaan smoking area	Sudah	Pusdiklatwas BPKP telah menyediakan smoking area di beberapa titik.	
3	Penyesuaian produk layanan diklat mengacu kepada kebijakan pengawasan terkini.	Sudah	Sebagian besar diklat-diklat tahun 2025 untuk pegawai BPKP diselenggarakan	

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Dokumentasi Kegiatan																																																															
			dalam rangka mendukung Agenda Prioritas Pengawasan BPKP 2025.																																																																
4	Perubahan metode diklat dari Tatap Muka menjadi PJJ	Sudah	Perubahan metode diklat sudah masuk ke dalam kaldik 2025, sehingga menunggu realisasi diklat tersebut di mulai TW II 2025.	<table><tr><td>221</td><td>Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika</td><td>0675</td><td>14 Jul 2025</td><td>18 Jul 2025</td><td>Pembelajaran Jarak Jauh</td><td>PHBP</td></tr><tr><td>222</td><td>Evaluasi atas Implementasi SAKIP</td><td>0194</td><td>14 May 2025</td><td>20 May 2025</td><td>Pembelajaran Jarak Jauh</td><td>PHBP</td></tr><tr><td>223</td><td>Audit Kinerja Berbasis Risiko bagi APF/KL</td><td>0384</td><td>14 May 2025</td><td>20 May 2025</td><td>Pembelajaran Jarak Jauh</td><td>PHBP</td></tr><tr><td>224</td><td>Audit Pengadaan Barang dan Jasa</td><td>0385</td><td>14 May 2025</td><td>20 May 2025</td><td>Pembelajaran Jarak Jauh</td><td>PHBP</td></tr><tr><td>225</td><td>Audit Pengadaan Barang dan Jasa</td><td>0385</td><td>14 May 2025</td><td>20 May 2025</td><td>Pembelajaran Jarak Jauh</td><td>PHBP</td></tr><tr><td>226</td><td>Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik</td><td>0607</td><td>14 May 2025</td><td>20 May 2025</td><td>Pembelajaran Jarak Jauh</td><td>PHBP</td></tr><tr><td>227</td><td>Audit Pengadaan Barang dan Jasa</td><td>0632</td><td>14 May 2025</td><td>20 May 2025</td><td>Pembelajaran Jarak Jauh</td><td>PHBP</td></tr><tr><td>228</td><td>Fungsional Auditor Atasi Pertama</td><td>0641</td><td>15 Jul 2025</td><td>25 Jul 2025</td><td>Pusdiklatnas BPKP</td><td>PHBP</td></tr><tr><td>229</td><td>Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum</td><td>0663</td><td>14 Jul 2025</td><td>18 Jul 2025</td><td>Pembelajaran Jarak Jauh</td><td>PHBP</td></tr></table>	221	Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	0675	14 Jul 2025	18 Jul 2025	Pembelajaran Jarak Jauh	PHBP	222	Evaluasi atas Implementasi SAKIP	0194	14 May 2025	20 May 2025	Pembelajaran Jarak Jauh	PHBP	223	Audit Kinerja Berbasis Risiko bagi APF/KL	0384	14 May 2025	20 May 2025	Pembelajaran Jarak Jauh	PHBP	224	Audit Pengadaan Barang dan Jasa	0385	14 May 2025	20 May 2025	Pembelajaran Jarak Jauh	PHBP	225	Audit Pengadaan Barang dan Jasa	0385	14 May 2025	20 May 2025	Pembelajaran Jarak Jauh	PHBP	226	Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik	0607	14 May 2025	20 May 2025	Pembelajaran Jarak Jauh	PHBP	227	Audit Pengadaan Barang dan Jasa	0632	14 May 2025	20 May 2025	Pembelajaran Jarak Jauh	PHBP	228	Fungsional Auditor Atasi Pertama	0641	15 Jul 2025	25 Jul 2025	Pusdiklatnas BPKP	PHBP	229	Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum	0663	14 Jul 2025	18 Jul 2025	Pembelajaran Jarak Jauh	PHBP
221	Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	0675	14 Jul 2025	18 Jul 2025	Pembelajaran Jarak Jauh	PHBP																																																													
222	Evaluasi atas Implementasi SAKIP	0194	14 May 2025	20 May 2025	Pembelajaran Jarak Jauh	PHBP																																																													
223	Audit Kinerja Berbasis Risiko bagi APF/KL	0384	14 May 2025	20 May 2025	Pembelajaran Jarak Jauh	PHBP																																																													
224	Audit Pengadaan Barang dan Jasa	0385	14 May 2025	20 May 2025	Pembelajaran Jarak Jauh	PHBP																																																													
225	Audit Pengadaan Barang dan Jasa	0385	14 May 2025	20 May 2025	Pembelajaran Jarak Jauh	PHBP																																																													
226	Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik	0607	14 May 2025	20 May 2025	Pembelajaran Jarak Jauh	PHBP																																																													
227	Audit Pengadaan Barang dan Jasa	0632	14 May 2025	20 May 2025	Pembelajaran Jarak Jauh	PHBP																																																													
228	Fungsional Auditor Atasi Pertama	0641	15 Jul 2025	25 Jul 2025	Pusdiklatnas BPKP	PHBP																																																													
229	Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum	0663	14 Jul 2025	18 Jul 2025	Pembelajaran Jarak Jauh	PHBP																																																													

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sekiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa Pusdiklatwas BPKP telah melaksanakan tindak lanjut sebanyak 100% rencana tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen Pusdiklatwas BPKP dalam menindaklanjuti masukan dari peserta guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat. Ke depan, upaya percepatan dan evaluasi berkala tetap diperlukan agar seluruh rencana tindak lanjut dapat terealisasi secara optimal.

Ciawi, 12 September 2025

Kepala Pusat,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Raden Murwantara